

Politik Dunia Arab Klasik dan Modern: Studi Kasus Kepemimpinan Ibnu Saud dan Husni Mubarak

Muhammad Irfan Maulana^{1*}, Aulia Nur Rahma²
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT: The Arab world is undergoing a transformation in leadership. Every powerful leader has characteristics in running the government politically. This study will examine the politics of the classical and modern Arab world by case studies on King Ibn Saud (Saudi Arabia) and King Husni Mubarak (Egypt). This research is a literature study that describes the character of the political system of Ibn Saud and Husni Mubarak. This study reveals that there are special characteristics that the two leaders have during their tenure. Ibn Saud smartly took advantage of the opportunity and got the world's attention with the Al Saud Clan's collusion politics and religious politics with Wahhabis. Husni Mubarak uses social media and technology to maintain power.

Keywords: Politics, Ibn Saud, Husni Mubarak.

ABSTRAK: Dunia Arab mengalami transformasi dalam kepemimpinan. Setiap pemimpin yang berkuasa memiliki karakteristik dalam menjalankan pemerintahan secara politis. Penelitian ini akan mengkaji karakter dalam dunia perpolitikan dunia Arab masa klasik dan modern dengan mengambil studi kasus pada Raja Ibnu Saud (Arab Saudi) dan Raja Husni Mubarak (Mesir). Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang mendeskripsikan karakter sistem politik Ibnu Saud dan Husni Mubarak. Penelitian ini mengungkap bahwa ada karakteristik khusus yang dimiliki kedua pemimpin selama berkuasa. Ibnu Saud cerdas memanfaatkan kesempatan dan mendapatkan perhatian dunia dengan politik kolusi Klan Al Saud dan politik agama bersama Wahabi. Husni Mubarak menggunakan media sosial dan teknologi untuk mempertahankan kekuasaan.

Kata Kunci: Politik, Ibnu Saud, Husni Mubarak.

Submitted: 01-07-2022; Revised: 10-07-2022; Accepted: 21-07-2022

*Corresponding Author : irfanseribu@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebuah sistem pemerintahan berjalan dengan prinsip yang dinamis dan politis. Politik dapat dipahami sebagai sebuah cara yang ketercapaiannya harus diraih dengan segala cara apapun, bahkan sampai menghalalkan segala cara (In'amuzzahidin, 2015, p. 90). Politik juga dapat dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan atau kenegaraan. Selain itu, politik dan pengetahuannya digunakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kepemilikan. Dalam bentuk lebih luas, politik adalah cara mempertahankan atau bahkan melanggengkan kekuasaan. Konsep mengenai perpolitikan sudah lebih dahulu dikenal oleh bangsa kuno dan klasik atau masyarakat sebelum zaman modern. Dalam kasus bangsa Arab, sistem perpolitikan tidak hanya dikenal oleh pemimpin di abad ke-21, tapi juga oleh pemimpin abad sebelumnya dan jauh sebelum itu. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan mengenai sistem perpolitikan yang berlaku atau yang dilaksanakan.

Penelitian ini mengkaji mengenai sistem perpolitikan antara pemerintah Arab masa klasik atau awal pendirian negara tersebut dan juga pemerintah di masa modern atau masa kini. Kajian mengenai masa klasik diambil dari studi kasus kepemimpinan Ibnu Saud sebagai raja pertama Arab Saudi yang berasal dari klan Al Saud. Perlu diketahui bahwa klan tersebut kemudian menjadi satu-satunya klan yang memimpin negara Arab Saudi semenjak awal berdiri sampai sekarang. Adapun studi masa modern adalah kasus perpolitikan yang dijalankan oleh Husni Mubarak, presiden yang sejarahnya tidak jauh dan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa besar Arab Spring.

PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini adalah library research atau studi kepustakaan dengan analisis deskriptif berupa mendeskripsikan sistem perpolitikan antara dua pemimpin tersebut. Analisa dilakukan terhadap data yang ditemukan pada referensi-referensi, seperti artikel pada jurnal ilmiah, di antaranya artikel yang berkaitan dengan klan Al-Saud beserta kepemimpinan salah satu anak sukunya. Selain itu peneliti juga menganalisis artikel yang berkaitan dengan peristiwa besar Arab Spring dan hal-hal lain yang terkait. Penelitian serupa ditemukan pada artikel yang ditulis oleh Ali Yazid Hamdani dengan judul "Debut Politik Muhammad Ibn Abdul Wahhab & Muhammad Ibn Saud". Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam rangka menjaga legitimasi kekuasaannya, Ibnu Saud menggunakan wahabi sebagai kendaraan politik. Fenomena tersebut dilihat juga dari kedekatan antara umara dan ulama, yaitu Ibnu Saud dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab sebagai pemimpin wahabi (Hamdani, 2019, p. 183). Penelitian lain adalah mengenai fenomena Arab Spring yang ditulis oleh Ahmad Sahide, dkk. Penelitian ini mengkaji mengenai kronologi Arab Spring dengan judul "Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya". Peneliti

memaparkan mengenai sejarah peristiwa Arab Spring beserta penyebab terjadinya dan apa saja pengaruhnya terhadap tatatan dunia. Pengaruh tersebut berada dalam ranah politik dan kehidupan sosial masyarakat (Sahide et al., 2016, p. 128).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai Ibnu Saud, tentu tidak lepas dari statusnya sebagai peletak dasar dan pendiri negara Arab Saudi. Pada awal pendiriannya, mulanya Arab Saudi hanyalah sebuah daerah di kawasan wilayah Nejd dan Hijaz. Pada masa itu, status suku maupun klan antara satu dengan yang lainnya adalah sepadan. Tidak ada yang lebih unggul ataupun memiliki legitimasi khusus atau pengaruh yang dominan, kecuali suku yang memang memiliki keterkaitan dengan kelompok istimewa yang berpengaruh. Klan Al Saud kemudian sukses dalam menempatkan diri pada status sosial yang dominan setelah berhasil menyatukan bangsa Arab melalui propaganda-politik pada Revolusi Arab di tahun 1921. Ibnu Saud dianggap pandai mengambil kesempatan, di mana saat itu bangsa Arab belum memiliki jiwa persatuan, sehingga kehadirannya dianggap menjadi peletak dasar Arab Saudi pada khususnya, dan dunia Arab pada umumnya. Hasil dari persatuan yang ia bangun kemudian menjadikan klannya, yaitu klan Al Saud, memiliki status yang tinggi sebagaimana statusnya sebagai orang nomor satu. Kesempatan ini kemudian tidak disia-siakan olehnya. Banyak jabatan atau kursi pemerintahan yang diisi oleh orang dari suku atau klannya sendiri. Bahkan, raja selanjutnya juga sudah disiapkan dengan nama putra mahkota yang tentunya dari keluarganya sendiri. Dengan cara berbagi jabatan dan kekuasaan, mereka berusaha melanggengkan kekuasaan raja dengan logika bahwa apabila semua penentu dan pemangku kebijakan adalah keluarga sendiri, maka kebijakan dapat dibuat sedemikian rupa supaya menguntungkan diri sendiri.

Pada masa itu, publikasi berbentuk arus media informasi digital berbasis teknologi belum semaju dan semasif sekarang. Kalaupun ada media elektronik yang ditayangkan, pastinya hanya tayangan yang sudah mendapatkan legitimasi atau perizinan dari kerajaan. Beberapa sastrawan atau penulis klasik senior yang berusaha melakukan perlawanan terhadap kolusi dan nepotisme tersebut hanya mampu berjuang melalui tulisan-tulisan di buku-bukunya. Tidak serta merta mendapatkan kekuatan massa untuk menyampaikan aspirasi bahkan menggulingkan pemerintahan yang menurut mereka zalim. Hal ini berbeda dengan pemerintah dan penguasa pada zaman dahulu, mereka menggunakan kekuasaan tidak hanya supaya dapat bertahan di lingkaran jajaran penguasa, tetapi juga untuk media transformasi ilmu (Hak, 2010, p. 120). Terlepas dari bentuk pemerintahan yang bersifat monarki atau kerajaan dan

turun menurun, Arab Saudi memang tidak dapat dibandingkan dengan pemerintahan Mesir yang berbentuk Republik. Akan tetapi, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa adanya politik yang digunakan oleh raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu dengan mencampuradukkan nama negara dengan nama agama. Sehingga karena keduanya melebur, maka menjadi sebuah kekuatan besar yang tidak terbandung. Inilah yang menjadi ciri khas dari kepemimpinan raja Ibnu Saud. Bahkan, di golongan atau kaum Wahabi, sosok raja Ibnu Saud ini juga dipandang sebagai Al Imam, selain Muhammad bin Abdul Wahhab selaku imam utamanya. Hal ini kemudian memunculkan bias bahwa seakan-akan antara Arab Saudi dan Wahabi tidak dapat dipisahkan karena telah menjadi satu kesatuan yang padu dan tak terbandung.

Sama halnya dengan Ibnu Saud, Husni Mubarak juga memiliki karakter dalam menjalankan sistem politik. Kepemimpinan Husni Mubarak sebagai presiden Mesir tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Arab Spring. Sebuah gejala pergerakan besar yang sekaligus mengakhiri langkahnya sebagai orang nomor satu di negara tersebut. Peristiwa Arab Spring adalah salah satu tragedi di timur tengah yang menjadi sorotan dunia internasional. Peristiwa tersebut mengguncang dunia semenjak terjadinya runtutan peristiwa yang melibatkan banyak sekali pihak dan elemen masyarakat. Banyak korban berjatuh sebagai akibat dari peristiwa berdarah tersebut, baik dari kalangan masyarakat sipil atau non-sipil. Tragedi Arab Spring tidak terjadi secara spontan atau menjadi sebuah fenomena yang langsung terbentuk dan terlaksana seketika, tetapi melalui proses panjang, baik sebelum peristiwa tersebut ataupun berkaitan dengan pengaruh besar setelah terjadinya titik puncak. Arab Spring dapat dikatakan sebagai puncak dari huru-hara dan ketegangan yang telah terjadi selama beberapa tahun bahkan dekade sebelumnya. Ibnu Burdah (2014, p. 461) menyatakan bahwa akibat dari kejadian ini adalah munculnya istilah Arab Spring Countries yang merujuk pada beberapa negara terimbas Arab Spring. Bentuk pengaruh yang konkrit adalah dalam wujud gerakan-gerakan atau kelompok massa yang bergerak secara masif.

Arab Spring adalah sebuah fenomena besar dunia Arab. Sebagaimana namanya, puncak dari tragedi tersebut terjadi pada musim semi tahun 2011. Peristiwa ini ibarat magma perlawanan yang naik ke permukaan dan meledak setelah sekian lama dipendam dan dibungkam oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan yang dimaksud adalah hegemoni kekuasaan pemimpin negara yang melanggengkan kekuasaannya dengan tangan dingin diktator. Rakyat tidak diberi wewenang atau kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Pembatasan menyampaikan aspirasi dan apa yang menjadi keresahan publik adalah awal dari hukum kausalitas panjang yang bermuara pada terjadinya Arab Spring. Jauh sebelum kemelut ini terjadi,

sebagian negara Arab, Mesir salah satunya, adalah negara yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang telah lama duduk di kursi kenegaraan. Presiden Husni Mubarak telah menjabat sebagai kepala negara selama kurang lebih 30 tahun. Dia diangkat sebagai presiden setelah Anwar Sadat yang sebelumnya memimpin Mesir tewas karena terbunuh dalam serangan saat upacara hari besar angkatan bersenjata Mesir. Saat itu, Husni Mubarak menjadi wakil dari Anwar Sadat, sehingga dia diangkat untuk menggantikan posisinya dan duduk di kursi kepresidenan.

Selama tiga dekade dipimpin oleh orang yang sama, Bangsa Mesir mulai meresahkan kepemimpinannya. Ada ketidakpuasan yang disebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, banyaknya masyarakat yang tidak bisa baca tulis atau melek aksara, serta secara umum tidak menunjukkan adanya geliat presiden untuk membawa negara menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini diperburuk ketika jauh sebelum Arab Spring, saat Mubarak masih menjabat sebagai presiden, media elektronik untuk informasi seperti televisi, radio, dan semacamnya yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan ataupun menampung suara-suara rakyat justru dibatasi dan menjadi tangan kanan pemerintah untuk menutup mata dan telinga atas cacat dan keburukan pemerintahannya. Keadaan yang buruk bagi demokrasi di Mesir itu tidak hanya dirasakan saat kepemimpinan Mubarak saja, tetapi jauh sebelum itu saat Sadat masih berkuasa, demokrasi yang dijanji-janjikan hanya menjadi sumpah jabatan saja. Pada masa itu, tidak ada yang berhak mendapatkan kebebasan untuk berpendapat, bahkan sekelas pejabat pemerintahan sekalipun. Terlebih bagi para oposisi pemerintah. Satu bukti nyata adalah peristiwa pengeblosan Nawal El Saadawi ke dalam penjara Barrages bersama dengan beberapa perempuan pejuang yang lain. Dalam bukunya *Memoirs from The Women's Prison*, Nawal menceritakan detail saat ia pertama kalinya diangkut dari rumahnya menuju ke penjara sampai kemudian mengikuti penyidikan dan berakhir dikeluarkan dari penjara sesaat setelah Sadat dibunuh. Dalam buku tersebut, berkali-kali Nawal menggambarkan betapa mengerikannya pena dan kertas bagi pemerintahan. Kedua benda itu diibaratkan media sosial yang diibaratkan sebagai media kebebasan berpendapat. Pena dan kertas dianggap lebih berbahaya dibanding pistol karena pengaruhnya bagi para pembaca dan publik pada umumnya. Sehingga yang dijadikan permasalahan saat penyidikan adalah tulisan-tulisan dan ungkapan-ungkapan Nawal saat mengisi seminar yang dianggap sebagai tempat dia menyampaikan aspirasi dan kekecewaan kepada pemerintahan.

Tragedi besar tersebut terjadi di hampir sebagian besar wilayah dunia Arab, akan tetapi puncak dan fenomena konkritnya dapat dilihat di tiga negara, yaitu Tunisia, Mesir, dan Syria atau Suriah. Ketiga negara tersebut melihat dan merasakan langsung saat rakyat dan pemerintahnya saling melawan dan

mempertahankan diri. Saat itu, massa yang bergerak sangat besar dan masif layaknya telah mendapatkan informasi mengenai pergerakan dan rencananya.

Muncul anggapan bahwa masifnya gerakan Arab Spring tersebut disebabkan adanya pengaruh dari jejaring media sosial yang berkembang pesat. Hal ini tidak dapat dimungkiri dengan mengingat bahwa saat itu sudah banyak media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa media sosial yang sudah dikenal oleh penggunaannya saat itu, di antaranya adalah Facebook, Twitter, dan YouTube. Media sosial itu yang kemudian membangun kekuatan besar masyarakat sesaat setelah terjadinya peristiwa pembakaran diri oleh salah satu pemuda Tunisia bernama Bouazizi. Ia membakar dirinya sebagai bentuk perlawanan lantaran menjadi korban dari ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan tidak adanya dukungan bahkan perlindungan saat dirinya mencoba melapor memohon bantuan. Sejenak kemudian publik terbakar amarahnya dengan didukung dokumen berupa foto atau video yang disebarluaskan secara masif melalui media sosial. Keadaan yang mengerikan ini kemudian memunculkan konflik berkepanjangan yang dipengaruhi oleh negara sekitar yang terdampak. Akibat dari konflik ini adalah pesatnya kemunculan hal-hal buruk seperti buruknya perlakuan terhadap perempuan yang nantinya dapat menghambat kemajuan (Skuse, 2021).

Sejak saat itu tampuk kepemimpinan Mubarak berada di ujung tanduk. Dahulu, ia berusaha mati-matian mempertahankan kekuasaannya dengan menjaga semua informasi yang keluar dari media nasional, seperti televisi, radio, dan lain-lain. Salah satu kebijakan yang membuat publik geram adalah pemutusan jaringan semua media sosial di Mesir beberapa saat sebelum ia lengser. Namun, setelah media sosial merebak dalam penggunaannya, semua orang tidak lagi diam menjadi konsumen berita, tetapi masing-masing punya kekuatan untuk memproduksi atau menjadi produsen berita tanpa adanya intervensi dan tantangan publikasi dari pihak manapun. Sehingga pada masa kepemimpinan Mubarak, media sosial adalah kunci dari hidup dan mati sebuah kekuasaan. Sedikit menyinggung perkembangan media sosial, saat ini, banyak sekali pihak-pihak yang sengaja diberi ruang di publik sebagai sebuah kelompok sosial yang memiliki tujuan khusus untuk menjadi netralisir atau pembangun kekuatan salah satu pihak atau golongan tertentu. Biasanya golongan ini disebut juga dengan buzzer. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial di masa sekarang ini, tidak peduli siapa pemimpinnya dan dari latar belakang keluarga manapun. Sejalan dengan hal itu, media sosial bertransformasi tidak lagi menjadi media komunikasi atau sarana penghubung segelintir orang atau bahkan banyak orang dan golongan, tetapi sudah menjadi satu kendaraan politik yang bisa dipengaruhi oleh kepentingan dan juga menjadi arena pertarungan yang politis (Anggara & Pratama, 2019, p. 307). Perkembangan fungsi media

sosial sebagai ruang publik tidak dapat berjalan baik apabila masih ada kekuatan yang menekan dan membatasi ataupun belum ada konsensus/keepakatan bersama. Masalah ini dapat menghambat terwujudnya ruang bicara untuk publik sebagai bentuk demokrasi (Sary, 2015, p. 78).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan fakta-fakta dan realitas yang ditemukan pada pemaparan di atas, maka terdapat karakteristik khusus pada sistem perpolitikan kekuasaan pemerintahan kedua pemimpinkekuas bangsa Arab tersebut. Ibnu Saud sebagai raja pertama Arab Saudi pandai dalam mengambil celah kekuatan dunia Arab. Dia juga menggunakan politik kolusi bersama keluarga klan Al Saud. Selain itu, Ibnu Saud juga berkoalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahhab yang notabene adalah seorang pemimpin Wahabi untuk menjadi kendaraan politik dan menghimpun kekuasaan besar untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa Arab Saudi. Langkah yang sama juga dilakukan Husni Mubarak. Presiden Mesir tersebut menggunakan media sosial sebagai cara menjaga kekuasaannya. Pemerintahannya menjaga setiap informasi dan berita yang keluar dari stasiun televisi, radio, dan media nasional lainnya. Semua konten disaring supaya tidak ada yang merugikan pemerintahannya, termasuk aspirasi, pendapat, dan rintihan warga masyarakatnya, semuanya dibungkam sehingga menimbulkan kesan bahwa Mesir adalah negeri yang damai dan pemerintahannya sukses mengelola negaranya. Kekuasaan Mubarak resmi digulingkan di masa-masa terjadinya puncak gejolak dari Arab Spring.

Apabila melihat kesimpulan penelitian di atas, sangat mungkin sekali muncul perbedaan pada studi kasus pemimpin yang lain. Maka, selayaknya penting dan perlu untuk melakukan penelitian yang wilayahnya lebih luas lagi, sehingga dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang lebih variatif dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada segenap akademisi yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, khususnya segenap dosen, guru, teman-teman peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Pratama, H. S. (2019). Masyarakat Jejaring, Media Sosial, Dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Terhadap Fenomena Arab Spring Dan "Teman Ahok." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 9(3), 287–310.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>
- Burdah, I. (2014). New trends in Islamic political parties in the Arab spring countries. *Al-Jami'ah*, 52(2), 459–485.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.459-485>
- Hak, N. (2010). Distribution Of Books, Development Of Science, And Dakwah In The Process Of Classic Islamic Civilization. *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 11(2), 105–126.
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/406>
- Hamdani, A. Y. (2019). Debut Politik Muhammad Ibn Abdul Wahhab & Muhammad Ibn Saud. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(2), 176–184.
<https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.38>
- In'amuzzahidin, M. (2015). Etika Politik Dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 89–106.
<https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>
- Sahide, A., Cipto, B., Muti'ah Setiawati, S., & Hadi, S. (2016). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktornya Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 118–129.
<https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129>
- Sary, F. D. (2015). PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA TIMUR TENGAH PASCA ARAB SPRING. *PROSIDING UI ISME 2015 Dinamika Budaya Timur Tengah Pasca Arab Spring*, 69–78.
- Skuse, D. (2021). Conflict and community: mental health in the Arab world. *BJPsych International*, 18(1), 1–1.
<https://doi.org/10.1192/bji.2020.59>